



Pemkot Dampingi 184 Orang Tua Korban Daycare Little Aresha

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga dan anak yang menjadi korban dugaan kekerasan serta penelantaran di Little Aresha Daycare, Kemantren, Umbulharjo.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 184 orang tua korban telah mengak-

ses layanan konsultasi dan bantuan yang disediakan melalui *helpdesk* khusus yang dibentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa penanganan korban kini telah memasuki tahap pendampingan

spesifik, baik dari sisi psikologis, medis, maupun hukum. Pihaknya pun memastikan setiap anak maupun orang tua korban mendapatkan penanganan dari para ahli yang benar-benar kompeten di bidangnya.

● ke halaman 7

Pemkot Dampingi

● Sambungan Hal 1

"Sampai kemarin, ada 184 orang tua yang sudah berkonsultasi dan kita layani. Hari Minggu kemarin, kami kumpulkan para orang tua untuk mendapatkan pendampingan langsung dari psikolog anak," ujarnya, Jumat (15/5).

Hasto menjelaskan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan pemetaan terhadap kondisi anak-anak yang terdampak dari berbagai aspek. Berdasarkan hasil identifikasi, bantuan medis diberikan sesuai dengan klasifikasi gangguan yang dialami anak, mulai dari gangguan fisik hingga masalah tumbuh kembang.

"Mana yang ada gangguan fisik, mana yang gangguan tumbuh kembang, itu datanya sudah final. Mereka sudah mendapatkan pendampingan dari psikolog dan dokter ahli tumbuh kembang anak," jelasnya.

Tak hanya fokus pada pemulihan mental dan fisik, aspek keadilan bagi para korban juga menjadi prioritas yang diperjuangkan Pe-

merintah Kota Yogyakarta. Mantan Kepala BKKBN RI tersebut menandakan, ada 18 advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Peduli Anak Yogyakarta untuk mengawal penuh kasus ini.

"Advokat-advokat ini mendengarkan curhat dan keluhan orang tua korban. Tugas mereka menyampaikan ini kepada penyidik atau APH. Semuanya tetap diproses hukum, tidak ada yang tidak diproses," tegasnya.

Lebih lanjut, buntut kasus Little Aresha Daycare, Pemkot Yogyakarta sudah bergerak cepat menggu-
liruh daycare yang belum memiliki izin dilarang memberikan layanan untuk sementara waktu," urainya.

Kamar tipu-tipu

Sementara itu, polisi membenarkan adanya praktik kamar "tipu-tipu" di Daycare Little Aresha Yogyakarta untuk meyakinkan para orang tua yang ingin menitipkan pengasuhan di sana.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Iptu Apri Sawitri, mengatakan, kamar percontohan itu sengaja disiapkan pengurus yayasan supaya terkesan bahwa Little Aresha memiliki pelayanan yang memadai. Namun kenyataannya sebaliknya, para bayi dan balita justru tersiksa dibalik dinding kamar yang pengap. Ketua Yayasan Daycare Little Aresha juga selalu menjajankan pertemuan dengan calon konsumennya di hari Sabtu.

"Benar, ada kamar percontohan. Pada awal anak-anak mau ke Little Aresha disampaikan memang kamarnya bagus," ujar Apri saat dihubungi, Jumat (15/5).

Apri menyampaikan, kamar tipu-tipu itu memiliki fasilitas yang nyaman di

antaranya AC serta kasur untuk tidur yang memadai. Para orang tua juga dijanjikan bahwa satu pengasuh akan melayani satu bayi maupun balita.

"Istilahnya layak dan memang (tujuannya) untuk meyakinkan orang tua," terang dia.

Di sisi lain, saat ini Polisi terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para saksi. Apri menyampaikan, untuk hari ini Jumat (15/5) pihaknya memanggil 50 saksi pelapor untuk memperkuat bukti.

Sementara 17 karyawan yang kini berstatus saksi, terdiri dari berstatus, *security*, guru TK dan ART di sana masih menjalani wajib lapor. Apri menegaskan, tidak menutup kemungkinan mereka yang kini sebagai saksi akan ditetapkan sebagai tersangka.

"Tetapi kami fokuskan 13 yang kami tangani, karena kalau sudah fokus 13 sudah jadi laporan sosial, psikolog kan setidaknya jaksa pasti ada alat bukti yang lebih kuat lagi, baru nanti proses selanjutnya kita dalam pengasuh-pengasuh yang lain," ujar Apri. (aka/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005